

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Tribun Jateng
Media Online

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan 7

Dana Covid Baru Terserap 30 Persen

Jateng Anggarkan Belanja Tidak Terduga Rp 1,9 Triliun

SEMARANG, TRIBUN - Serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah masih rendah. Dari total anggaran sebesar Rp 1,9 triliun dari APBD Jateng baru terserap sekitar Rp 600 miliar atau 30 persen.

Hal itu terungkap saat Komisi C DPRD Jateng menggelar rapat rencana kerja perangkat daerah bersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jateng. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, mengaku kaget

STORY HIGHLIGHTS

- Jawa Tengah anggarkan BTT Rp 1,9 triliun
- Tanggal 3 Juli baru terserap 30 persen
- Dinsos Jateng mendapat Rp 1,3 triliun
- BPKAD sebut penerima bantuan tak boleh double

mendengarkan penyerapan anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 di Jateng. Menurutnya, angka tersebut tergolong rendah, umat (3/7).

Tribun Jateng menelusuri dan mengungkap fakta yang terjadi, terkait serap-



Dana Covid...

■ DARI HALAMAN 1

cussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa sebagai upaya yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19. Revisi anggaran pun segera dilakukan dan diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kementerian, lembaga, dan pmda agar mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, untuk penanganan Covid-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya. Menkeu menyebutkan angka APBN 2020 senilai Rp 62,3 triliun, yang bisa direalokasi untuk dana penanganan penyebaran COVID-19.

Corona Virus Disesase 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

Gubernur mengalokasikan anggaran BTT sebesar Rp 1.987.003.130.000, (Rp 1,9 triliun) untuk kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Anggaran BTT tersebut dipecah untuk beberapa SKPD yang ditunjuk gubernur untuk melakukan percepatan penanganan dampak Covid-19.

Di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran BTT sebesar Rp 422.150.679.000. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi Rp 4.645.000.000.

Disporapar Rp 2.077.500.000. Dinas Koperasi dan UKM Rp 108.780.000.000. Disperindag Rp 3.496.650.000.

Dinas Ketahanan Pangan Rp 8.750.000.000. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 30.812.400.000. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 68.597.490.000.

Dinas Perhubungan Rp 16.097.680.000. Sekretariat BPBD 1.094.200.000. Dinas Sosial Rp 1.320.562.461.000.

Untuk melakukan pencairan dana BTT, Kepala SKPD hanya dapat mengajukan pencairan dana secara bertahap sesuai kebutuhan dengan ketentuan maksimal untuk kebutuhan satu bulan. Sebelum pencairan, tiap SKPD wajib menyerahkan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) yang sudah direview oleh Inspektorat.

Selain itu, Kepala SKPD wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab yang sudah ditandatangani dan berisikan pernyataan bahwa uang akan digunakan sesuai dengan RKB. Bertanggung jawab penuh baik keuangan maupun fisik atas penggunaan dana tersebut.

Bendahara Pengeluaran SKPD kemudian akan menyampaikan laporan bulanan atas pengelolaan dana antisipasi, dan penanganan dampak penularan Covid-19

kepada BPKAD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Apabila ada sisa kas dana BTT untuk penanganan Covid-19, uang akan tetap disimpan di Bendahara Pengeluaran SKPD selama masa tanggap darurat. Kecuali sudah tidak digunakan lagi atau masa tanggap darurat telah selesai, dengan ketentuan harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 10 hari sejak berakhirnya masa tanggap darurat.

Penerima Bantuan Tak Boleh Double

Tribun Jateng menemui Sumarno Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Bertanya bagaimana proses penyerapan anggaran BTT sebesar Rp 1,9 triliun untuk penanganan kesehatan, sabuk pangan sosial, serta pemulihan ekonomi di Jawa Tengah.

Pihaknya menjelaskan, sasaran penerima anggaran BTT didasarkan pada data yang masih belum valid. Ia mencontohkan data di Dinas Sosial untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum dicover oleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Maka DTKS digunakan untuk alokasi anggaran BTT yang kemudian ditemukan angka yang tepat berdasarkan data tersebut. Namun tak berselang lama, Kementerian Sosial mengeluarkan aturan bahwa masyarakat yang masuk dalam DTKS akan dicover langsung oleh Kemensos.

"Akhirnya Dinsos Provinsi Jateng mau tak mau harus mencari data penerima bansos dari anggaran BTT diluar DTKS. Karena aturannya, penerima bantuan tidak boleh double. Maka yang terjadi serapan anggarannya akan disesuaikan dengan penyalangan," terangnya.

Selain itu, ada pula kebutuhan dari alokasi anggaran yang bisa tercukupi tanpa menggunakan anggaran dari BTT. Sumarno mencontohkan RSUD Tugurejo seharusnya mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pembuatan ruang isolasi.

"Tapi kenyataannya pembuatan ruang isolasi tersebut sudah bisa dicover dengan anggaran yang dimiliki oleh RSUD Tugurejo. Akhirnya anggaran yang sudah disiapkan tidak terpakai. Kemudian

Dinas Bina Marga juga kami alokasikan anggaran untuk membuat ruang isolasi di aset milik Pemprov Jateng. Faktanya sudah tercukupi dengan anggaran dari badan diklat. Jadi anggaran BTT tidak terpakai," papar dia.

Ia melanjutkan alokasi anggaran BTT untuk Dinas Perhubungan yang akan digunakan untuk pembuatan posko mudik. Padahal pemerintah pusat saat itu mengeluarkan instruksi larangan mudik saat lebaran.

"Maka dari alokasi 16 posko yang akan dibuat, hanya terrealisasi 8 posko mudik saja. Itupun anggaran yang digunakan sudah tersedia di Dinas Perhubungan. Karena memang setiap tahun mereka ada anggaran untuk posko mudik. Maka anggaran BTT tidak terpakai untuk itu, walaupun sudah dialokasikan," ujar pria yang hobi bersepeda ini.

Berdasarkan data yang diketahui Sumarno, hingga saat ini anggaran BTT yang sudah disalurkan ke SKPD sebesar Rp 558,97 miliar. Artinya masih sekitar 28,13% anggaran BTT yang sudah digunakan.

"Posisinya saat ini kan masih proses berjalan. Serapan paling tinggi tentu Dinsos, karena yang paling banyak mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,3 triliun. Mengapa paling banyak, karena pemerintah ingin kebutuhan pokok masyarakat bisa tercukupi. Jangan sampai masyarakat kelaparan karena kehilangan pekerjaan. Kalaulah nanti ada anggaran untuk Dinsos yang tidak terpakai, maka bisa dialokasikan untuk SKPD lain apabila dibutuhkan karena ada ke daruratan," bebarnya.

Apabila nanti setelah status tanggap darurat Covid-19 dihentikan, sedangkan anggaran BTT masih tersisa, maka uang tersebut akan digunakan untuk menutup defisit APBD Jawa Tengah. Sumarno mengakui Pemprov Jateng masih memiliki hutang bagi hasil.

"Mungkin nanti ada sebagian (anggaran BTT) untuk menutup itu. Jadi yang dari SKPD yang tidak dipakai untuk tutup defisit. Karena pendapatan sudah turun jauh sejak adanya pandemi Covid-19 ini," tutupnya. (tjm)

an anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, 16-18 Juli 2020. Maret lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan laman resmi Kemenuk, Inpres tersebut meminta kementerian atau lembaga mengutamakan alokasi anggaran yang ada, untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol yang telah ditentukan. Maka segera diambil langkah refo-

Anggaran BTT Jawa Tengah	
• Dinas Sosial	Rp 1.320.562.461.000
• Dinas Kesehatan	Rp 422.150.679.000
• Dinas Koperasi dan UKM	Rp 108.780.000.000
• Dispermasdukcabwil	Rp 68.597.490.000
• Dinas PPPA dan KB	Rp 30.812.400.000
• Dinas Perhubungan	Rp 16.097.680.000
• Dinas Ketahanan Pangan	Rp 8.750.000.000
• DPU Bina Marga dan Cipta Karya	Rp 4.645.000.000
• Disperindag	Rp 3.496.650.000
• Disporapar	Rp 2.077.500.000
• Sekretariat BPBD	Rp 1.094.200.000